

JAGA DAN PERGUNAKANLAH KOLEKSI
INI DENGAN BAIK

SUATU SAAT ANAK DAN CUCU ANDA
SANGAT MEMBUTUKANNYA



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
TERIMA TGL. :	20 DESEMBER 2005
UMBER HARGA :	H
KOLEKSI :	KI
NO. INVENTARIS :	2061K12005 - P, C1
KLASIFIKASI :	324-607 2 ALR - P1

LAPORAN PENELITIAN

**PERILAKU PEMBERIAN SUARA,
AKSES DAN KONTROL PEREMPUAN
DALAM PEMILU LEGISLATIF 2004
DI KOTA PADANG**

Oleh :

Dra. Al Rafni, M.Si.

DIBIYAI OLEH DANA DIPA UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DENGAN SURAT PERJANJIAN KONTRAK
NOMOR : 872/J41/KU/DIPA/2005, TANGGAL 02 MEI 2005

**FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

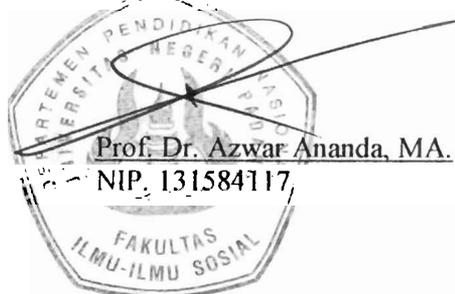
NOPEMBER, 2005

Halaman Pengesahan Penelitian Dana DIKS UNP

-
- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. a. Judul Penelitian | Perilaku Pemberian Suara, Akses dan Kontrol Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang |
| b. Bidang Studi | Ilmu Politik |
| c. Kategori | II |
| 2. Ketua Peneliti | |
| a. Nama Lengkap dan Gelar | Dra. Al Rafni, M.Si. |
| b. Jenis Kelamin | Perempuan |
| c. Gol. Pangkat dan NIP | Penata Tingkat I / III d ; 132056198 |
| d. Jabatan Fungsional | Lektor |
| e. Jabatan Struktural | --- |
| f. Fakultas/Jurusan | Fakultas Ilmu-ilmu Sosial / Ilmu Sosial Politik |
| 3. Jumlah Anggota Peneliti | --- |
| 4. Lokasi Penelitian | Kota Padang |
| 5. Kerjasama dengan Instansi Lain | --- |
| 6. Lama Penelitian | 8 bulan |
| 7. Biaya yang diperlukan | |
| a. Sumber dari DIKS UNP | Rp. 5.000.000,- |
| b. Sumber Lain | - |
| Jumlah | Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) |

Padang, 30 Nopember 2005

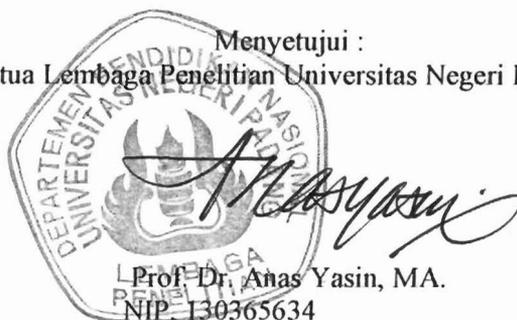
Mengetahui
Dekan FIS-UNP Padang ;



Ketua Peneliti ;

Dra. Al Rafni, M.Si.
NIP. 132056198

Menyetujui :
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang ;



ABSTRAK

Penelitian ini dari realitas politik yang mendomestikasi serta mempolitisasi perempuan, menerapkan ideologi patriarki, mengkooptasi mau pun menjadikan perempuan sebagai alat mobilisasi politik. Disamping itu kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini melakukan regulasi yang ketat terhadap perempuan. Kondisi ini berimplikasi terhadap perilaku pemberian suara perempuan dalam pemilu atau pun aktifitas lainnya dalam pemilu. Sehubungan dengan hal tersebut dan seiring dengan terjadinya reformasi politik terutama terkait dengan perubahan format pemilu 2004, maka permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah perilaku pemberian suara perempuan dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang? ; (2) Bagaimanakah akses (tingkat keterlibatan) perempuan dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang? ; dan (3) Sejauh mana kontrol yang dilakukan perempuan dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang?

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan metode kualitatif. Data dijangkau dari 45 responden yang tersebar di tiga kelurahan pada tiga kecamatan di Kota Padang, yaitu Kelurahan Purus Kebun untuk Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Air Tawar Barat untuk Kecamatan Padang Utara, dan Kelurahan Lubuk Buaya untuk Kecamatan Koto Tangah. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Khusus wawancara diperlukan untuk menganalisis lebih dalam terhadap jawaban yang diberikan responden. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif menggunakan model yang dikonstruksikan Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pemberian suara perempuan dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang telah berubah seiring dengan perubahan format politik yaitu dari perilaku tradisional-mobilisasi menjadi rasional otonom yang tercermin dari tiga alasan yang dikemukakannya dalam memilih partai yaitu : (1) partai yang dipilih adalah partai yang disegani dan merasa terikat padanya ; (2) partai yang dipilih adalah partai yang reformis ; dan (3) partai yang dipilih sesuai dengan aspirasinya. Namun pergeseran ini tidak diikuti oleh adanya *gender awareness* dari perempuan itu sendiri.

Akses perempuan dalam pemilu secara umum rendah hanya dalam hal ikut memilih dan menjadi simpatisan/penggembara dalam kampanye pemilu saja yang tinggi. Sementara itu paralel dengan aksesnya, kontrol perempuan dalam pemilu pun lemah kecuali dalam hal memberikan pertimbangan untuk memilih kandidat baik untuk caleg mau pun anggota DPD saja yang tinggi.

PENGANTAR

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait.

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk melaksanakan penelitian tentang *Perilaku Pemberian Suara, Akses dan Kontrol Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang*, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 872/J41/KU/DIPA/2005 Tanggal 02 Mai 2005.

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, maka Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dan kompleks dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan.

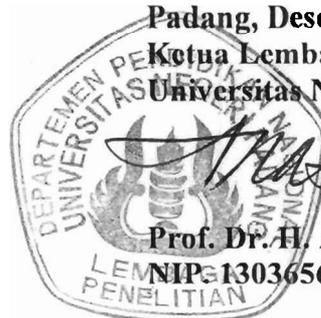
Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Kemudian untuk tujuan diseminasi dan kesempurnaan, hasil penelitian ini telah diseminarkan yang melibatkan dosen/tenaga peneliti Universitas Negeri Padang sesuai dengan fakultas peneliti. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, tim pembahas Lembaga Penelitian dan dosen-dosen pada setiap fakultas di lingkungan Universitas Negeri Padang yang ikut membahas dalam seminar hasil penelitian. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Padang, Desember 2005

Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang,



Anas Yasin
Prof. Dr. H. Anas Yasin. M.A
NIP. 130365634

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kontribusi Penelitian.....	4
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Perilaku Pemberian Suara dalam Pemilu.....	6
B. Akses dan Kontrol dalam Politik.....	8
C. Perempuan dalam Kehidupan Politik.....	15
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	19
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Responden Penelitian.....	19
C. Definisi Operasional Variabel.....	20
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data.....	21
E. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	21
F. Teknik Analisis Data.....	21
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	23
A. Hasil Penelitian.....	23
B. Pembahasan.....	33
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	42

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia ditemukan fakta bahwa perempuan memberikan kontribusi yang besar dari segi jumlah pemilih bila dibandingkan dengan laki-laki. Rata-rata kisaran pemilih perempuan semasa delapan kali penyelenggaraan pemilu Orde Baru adalah di atas 53% (Gaffar, 1997). Sementara pada pemilu era reformasi, dalam pemilu 1999 terdapat pemilih perempuan sejumlah 57% dari keseluruhan pemilih terdaftar (Morita, 1999) dan dalam pemilu legislatif 2004 sebesar 56-57%. Sayangnya kontribusi yang besar dari segi jumlah pemilih tersebut tidak sebanding dengan apa yang mereka terima dalam kehidupan politik, sebut saja dalam hal keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Fakta mengungkapkan bahwa di lembaga legislatif perempuan tidak terwakili secara proporsional. Pemilu-pemilu masa Orde Baru perempuan hanya terwakili tidak lebih dari 12%, sementara di era reformasi keterwakilan perempuan dalam pemilu 1999 merosot menjadi 9% sedangkan di pemilu legislatif 2004 hanya terwakili sekitar 11%. Jauh dari harapan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 65 ayat 1 Undang-undang Pemilu No.12 tahun 2003. Demikian pula dengan DPRD, di Provinsi Sumatera Barat misalnya dari 605 kursi anggota dewan, hanya 46 diantaranya yang diduduki perempuan (KPU Sumbar, 2004). Di bidang eksekutif, dalam sejarahnya jumlah perempuan yang menduduki posisi menteri dalam kabinet tidak lebih dari dua orang saja. Itupun dengan posisi yang relatif tidak menentukan. Pada kabinet Indonesia Bersatu ada kenaikan secara signifikan walaupun secara prosentase perempuan hanya sebesar 8,5% duduk di posisi menteri, sisanya disediakan untuk laki-laki. Kemudian dari 33

propinsi di Indonesia, tidak satupun gubernur yang perempuan, begitu pula dari 366 kabupaten-kota hanya 6 daerah yang dipimpin perempuan.

Realitas di atas sebenarnya merupakan gejala global di dunia, perempuan selalu dijadikan warga negara kelas dua. Perempuan hanya menduduki 14,3% dari keseluruhan anggota parlemen. Negara yang paling rendah prosentase keterwakilan perempuan di parlemen adalah negara-negara Arab (4,6%) sedangkan yang tertinggi 40% berada di negara-negara Skandinavia (IDEA, 2002). Sementara jumlah wanita yang menjadi kepala pemerintahan bisa dihitung dengan jari seperti Bangladesh, Irlandia, Guyana, Srilangka dan tentunya juga Indonesia (UNDP, 2004).

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam bidang politik, jika dicari akar permasalahannya dapat dikategorikan ke dalam dua faktor, yaitu faktor inheren yang melekat pada diri perempuan itu sendiri dan faktor di luar diri perempuan tersebut. Salah satu faktor di luar dari diri perempuan yang sangat berpengaruh dalam menentukan keterwakilan perempuan dalam politik adalah faktor struktur dan sistem politik dimana perempuan tersebut berinteraksi dengan dunia politik. Dengan kata lain intensitas keterlibatan perempuan dalam politik sangat diwarnai oleh model kepolitikan suatu negara dalam suatu masa (waktu).

Di masa Orde Baru, perempuan didomestikasi secara politis yaitu mempolitikasi perempuan, menerapkan ideologi patriarkhi, mengkooptasi perempuan, menjadikan perempuan sebagai alat mobilisasi politik disamping tentunya pemerintah melalui output berupa kebijakan-kebijakannya melakukan regulasi yang ketat terhadap perempuan. Realitas ini telah dilegalisasi oleh kepolitikan Orde Baru sepanjang 30 tahun laebih untuk mempertahankan status quo . Uhlín (1997) mengungkapkan struktur hubungan gender dalam kepolitikan Orde Baru telah turut berperan dalam menyokong otoritarianisme di Indonesia. Struktur hubungan gender dalam kepolitikan Orde Baru itu dapat ditemui dalam kebijakan-kebijakan sebagai output dari sistem politik, bersemayamnya ideologi patriarkhi dan

menjadikan perempuan sebagai alat mobilisasi politik bagi partai pemerintah terutama menjelang pemilu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kegiatan mobilisasi politik yang dilakukan pemerintah dikenal dengan slogan “tiada hari tanpa penggalangan” dan “satu merekrut sembilan”. Lebih lanjut Sanit (1994) mengungkapkan massa pemilih di Indonesia lebih banyak menjadi objek politik dibanding sebagai subjek.

Kondisi ini berakibat pada perilaku pemberian suara perempuan ataupun aktifitas lainnya dalam pemilu. Penelitian yang dilakukan oleh Noor (1994) menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan perempuan dalam pemilu seperti perilaku pemberian suara, ikut organisasi politik dan sebagainya adalah karena disuruh atau dimobilisasi oleh partai, atasan (pimpinan, suami, orang tua atau keluarga). Kondisi ini diperparah lagi oleh penerapan kebijakan massa mengambang atau *floating mass* yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru bagi massa di pedesaan yang notabene banyak terdapat pemilih perempuan. Kebijakan ini jelas melakukan pembodohan politik.

Bergulirnya reformasi politik membawa angin segar bagi kiprah perempuan di dunia politik. Tidak ada lagi mobilisasi politik ataupun kebijakan massa mengambang. Reformasi politik telah membuka cakrawala pandangan perempuan dalam memilih partai mana yang menjadi preferensi politiknya.

Untuk itu menarik diteliti bagaimana perilaku pemberian suara perempuan dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang. Artinya partai apa yang menjadi pilihan perempuan berikut apakah kandidat perempuan atau laki-laki yang menjadi pilihan mereka, lalu apakah alasan mereka memberikan suaranya terhadap pilihan tersebut. Penelitian ini juga dilakukan terhadap akses dan kontrol perempuan dalam pemilu sehingga akan lebih tergambar bagaimana keterlibatan perempuan (akses) pada pemilu dan kontrol yang dilakukannya terutama pada tahapan-tahapan pemilu yang memerlukan intensitas keterlibatan yang tinggi dari konstituen.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana perilaku pemberian suara perempuan dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang?
2. Bagaimana akses atau tingkat keterlibatan perempuan dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang?
3. Sejauh mana kontrol yang dilakukan perempuan dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Perilaku pemberian suara perempuan dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang.
2. Akses atau tingkat keterlibatan perempuan dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang.
3. Kontrol yang dilakukan perempuan dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang.

D. Kontribusi Penelitian

Temuan penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

1. Pusat kajian wanita untuk menyusun strategi dan pedoman kegiatan dalam rangka pemberdayaan perempuan khususnya di bidang politik.
2. Para pembuat kebijakan agar meletakkan kepentingan politik wanita sebagai agenda yang pantas mendapat perhatian.

3. Partai politik dalam rangka menyerap aspirasi wanita sehingga dapat menyusun *platform* politik yang sejalan dengan tuntutan-tuntutan baru yang muncul dari wanita khususnya dan dinamika masyarakat pada umumnya.
4. Pengembangan kepustakaan/teori dalam ilmu politik khususnya tentang gender dan politik, terutama mengetahui perilaku-memilih wanita dalam pemilu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perilaku Pemberian Suara dalam Pemilu

Perilaku pemberian suara adalah tindakan memilih yang berakibat memihaknya pemilih pada suatu partai yang menjadi kontestan pemilu. Dalam Ilmu Politik, untuk memahami bagaimana perilaku pemberian suara merujuk kepada teori *voting behavior*.

Di dalam kepustakaan tentang *voting behavior* terdapat dua mazhab yang menjadi sumber kajian. Kedua mazhab tersebut adalah Mazhab Colombia dan Mazhab Michigan. Mazhab pertama lebih menekankan peranan faktor sosiologis di dalam membentuk perilaku politik seseorang. Sementara itu mazhab yang kedua lebih memperhatikan faktor psikologis dari seseorang individu di dalam menentukan pilihan politiknya. Mazhab pertama dikenal sebagai model atau pendekatan sosiologis dan yang kedua dikenal sebagai model atau pendekatan psikologis. Pendekatan sosiologis mencermati perilaku memilih dari dimensi norma-norma dasar sosial yang berdasarkan atas pengelompokan sosiologis seperti agama, kelas (status sosial), pekerjaan, umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Dengan demikian pemahaman terhadap pengelompokan sosial, baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi profesi, kelompok-kelompok okupasi dan sebagainya, maupun pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya merupakan sesuatu yang vital dalam memahami perilaku politik. Oleh karena itu pendekatan ini beranggapan bahwa preferensi politik seseorang terhadap salah satu partai politik merupakan produk dari karakter sosial ekonomi individu yang bersangkutan (Gaffar, 1992). Dengan kata lain pola memilih

seseorang dapat diramalkan sesuai dengan karakteristik sosial yang melingkupi keberadaannya.

Dari beberapa peneliti *voting behavior* yang menggunakan pendekatan sosiologis dapat diambil suatu pengertian bahwa pendekatan ini lebih menekankan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku memilih seperti status sosial ekonomi, jenis kelamin, umur, agama, kelas, faktor geografis dan sebagainya. Pendekatan ini selalu menekankan pengelompokan sosial sebagai faktor yang menentukan preferensi politik.

Pendekatan berikutnya, yaitu pendekatan psikologis berangkat dari asumsi penentuan pilihan politik sangat ditentukan oleh pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam diri individu sebagai produk dari proses sosialisasi. Oleh sebab itu konsep sikap dan sosialisasi merupakan hal yang amat penting dalam pendekatan ini.

Sikap dan tingkah laku politik seseorang amat ditentukan oleh proses sosialisasi politik yang dialaminya sepanjang hidup. Sosialisasi adalah proses dimana individu secara pasif menerima nilai-nilai, sikap-sikap, peranan-peranan dalam masyarakatnya, sekaligus secara aktif mengembangkan pola kemandiriannya untuk menempatkan diri dan berperan dalam masyarakat di mana seseorang itu hidup. Sedangkan sosialisasi politik menunjukkan pada proses pembentukan sikap-sikap dan pola tingkah laku politik dan juga merupakan sarana bagi generasi untuk “mewariskan” patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi sesudahnya (Almond (ed.), 1974 : 44). Dengan demikian, pendekatan ini percaya pada apa yang disebut sebagai “agen” dari sosialisasi politik seperti keluarga, sekolah, teman bermain, media massa, partai politik dan organisasi massa, tempat bekerja dan sebagainya.

Melalui proses sosialisasi politik tersebut terbentuk ikatan psikologis seseorang dengan salah satu partai atau organisasi politik tertentu yang berwujud

simpati terhadap organisasi atau partai politik tersebut. Ikatan psikologis inilah yang disebut identifikasi kepartaian (*party identification*). Identifikasi partai ini merupakan konsep yang amat penting dalam pendekatan psikologis. Mereka berpendapat bahwa identifikasi partai merupakan faktor penjelas yang dominan terhadap perilaku memilih (*voting behavior*). Sebagaimana pengakuan Czudnowski (1976 : 76) berikut ini, *"this approach also particularly adequate for the analysis of voting in the United States, where "party identification" has been found to be the single most important variable determining voting preferences."*

Pemaparan sebelumnya memberikan pemahaman bahwa bagi penganut pendekatan psikologis sudah menjadi aksioma adanya hubungan pengaruh antara identifikasi kepartaian dengan perilaku memilih. Pilihan seseorang harus dipahami sebagai pernyataan loyalitas yang dibentuk oleh pengalaman (sosialisasi) sepanjang hidup.

Dengan demikian perilaku pemberian suara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *pada partai apa perempuan memberikan suaranya dalam pemilu legislatif 2004 dan sekaligus kandidat perempuan atau laki-laki kah yang menjadi pilihan mereka, lalu apa alasan yang menyebabkan mereka memilih partai tersebut bila ditinjau dari sudut sosiologis atau psikologis?*

B. Akses dan Kontrol dalam Politik

Berbicara tentang akses dan kontrol merupakan dua hal yang menjadi inti dari partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan pemerataan hak-hak politik bagi seluruh rakyat atau warga negara dan dimungkinkannya seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, partisipasi politik menyangkut kesediaan dan kemampuan untuk melakukan pembaharuan dalam rangka menghilangkan rintangan-rintangan pembangunan. Selain itu, partisipasi politik juga berarti bahwa keputusan-keputusan politik dalam pembangunan bertujuan pada distribusi

kekuasaan politik yang lebih egaliterian. Sedangkan pada tingkat yang paling dasar, partisipasi politik tercermin dalam peran serta masyarakat dalam partai politik, serikat pekerja dan lain-lain (Amien Rais dalam Alfian, dkk., 1988).

Timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, menurut Myron Weiner disebabkan oleh lima hal berikut, yaitu : *pertama, terjadinya modernisasi* yang mengakibatkan peningkatan terhadap pendidikan, pengembangan media komunikasi massa, urbanisasi yang meningkat dan sebagainya yang menjadikan masyarakat menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik. *Kedua*, perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Terbentuknya kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas sebagai akibat proses modernisasi mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik. *Ketiga*, pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern. Adanya ide-ide seperti egaliterisme dan nasionalisme yang ditransformasikan kaum intelektual yang penyebarannya didukung oleh sistem-sistem komunikasi modern telah membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik. *Keempat*, konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik. Timbulnya konflik dalam memperebutkan kekuasaan menyebabkan kelompok-kelompok yang bertikai mencari dukungan rakyat. Dengan cara ini mereka menganggap sah dan memperjuangkan idea-idea partisipasi massa dan akibatnya menimbulkan gerakan-gerakan yang menuntut agar hak-hak ini dipenuhi. *Kelima*, keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ke segala segi kehidupan sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik. Tanpa hak-hak sah atas partisipasi politik, individu-individu tidak berdaya menghadapi bahkan mudah dipengaruhi oleh tindakan-tindakan pemerintah yang mungkin saja merugikan kepentingannya (Mas'ood dan Colin MacAndrews, 1989).

Sementara itu Huntington dan Nelson (1976 : 4) menyatakan partisipasi

politik dengan *“we define political participation simply as activity by private citizens designed to influence governmental decision making.”* Dengan kata lain, partisipasi politik digambarkan sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Ilmuwan politik lainnya seperti Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* (Budiardjo,1981:1) memberikan batasan bahwa :

“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pembuatan kebijakan umum (*the term “political participation” will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*).

Sedangkan Miriam Budiardjo (1981 : 1) memberikan definisi umum dari partisipasi politik sebagai “kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah.” Lebih jauh ia juga memberikan gambaran bahwa partisipasi politik itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara ini secara garis besar mempunyai dua sasaran yakni mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuat dan pelaksana keputusan politik.

Berdasarkan berbagai batasan partisipasi politik yang telah dikemukakan sebelumnya, ada beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian kita, yaitu *pertama*, partisipasi politik merupakan tindakan yang bersifat legal, dalam arti dilindungi oleh aturan hukum yang berlaku sehingga merupakan sesuatu yang sah dan diterima dalam suatu negara yang demokratik. *Kedua*, partisipasi politik berbeda dengan sikap dan

perilaku politik. Sikap politik merupakan *psychological disposition* (watak psikologis) daripada seseorang dan perilaku politik tidak selamanya berkaitan dengan suatu tujuan yang hendak dicapai. Sementara itu partisipasi politik berkaitan erat dengan usaha dari individu untuk mencapai suatu tujuan. *Ketiga*, partisipasi politik merupakan tindakan politik yang dilakukan oleh warga masyarakat kebanyakan, bukan berkaitan dengan tindakan politisi profesional seperti tokoh partai-partai politik, anggota lembaga perwakilan rakyat, dan tokoh kelompok kepentingan. *Keempat*, partisipasi politik berkaitan erat dengan kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang bersifat mandiri, bukan kegiatan yang semata-mata bersifat seremonial atau pun yang digerakkan dari atas, baik oleh pemerintah maupun kalangan elit lainnya. *Kelima*, partisipasi politik merupakan kegiatan mempengaruhi pemerintah yang bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa perantara, sedangkan tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah.

Aktivitas yang disebut partisipasi politik dapat mengambil wujud beraneka ragam. Gabriel Almond misalnya, secara garis besar membagi partisipasi politik ke dalam dua bentuk, yaitu *konvensional* dan *non-konvensional*. Bentuk konvensional merupakan bentuk partisipasi politik yang normal atau legal. Pemberian suara, diskusi politik, kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif adalah beberapa bentuk konvensional. Sedangkan bentuk partisipasi politik yang non-konvensional mencakup yang legal seperti pengajuan petisi, mau pun ilegal seperti konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik terhadap harta benda dan manusia dan sebagainya. Bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dijadikan ukuran penilaian stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, serta kepuasan atau ketidakpuasan warga negara (Mas'ood dan Colin MacAndrews, 1989 : 46).

Sementara itu, Huntington dan Nelson menurut Afan Gaffar dalam tulisannya *Partisipasi Politik di Indonesia* menggolongkan partisipasi politik ke dalam bentuk kegiatan yang disebutnya *electoral activities, lobbying, organizational activities, contacting dan violence* (Prospektif No.1 Volume 3, 1991 : 27). Berikut ini akan dipaparkan secara ringkas masing-masing bentuk kegiatan partisipasi politik tersebut.

1. *Electoral activities*, yang mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemberian suara, dan juga penghitungan suara.
2. *Lobbying*, yaitu aktivitas individual ataupun kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah atau pun pemimpin politik untuk mempengaruhi keputusan mereka tentang sesuatu hal. Biasanya tindakan ini diharapkan untuk memperoleh dukungan atau pun untuk menciptakan oposisi
3. *Organizational activities*, yang mencakup kegiatan yang berkaitan dengan dukungan terhadap suatu organisasi tersebut, dan terlibat dalam aktivitas organisasi untuk mempengaruhi pemerintah.
4. *Contacting*, yaitu tindakan individu yang menghubungi secara langsung pejabat pemerintah untuk menyampaikan segala sesuatu persoalannya.
5. *Violence*, atau tindakan yang berbentuk unjuk rasa bahkan kekerasan politik dapat juga dikategorikan sebagai partisipasi politik. Biasanya tindakan seperti ini dijalankan kalau saluran untuk menyampaikan aspirasi politik tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Ilmuwan politik lainnya, Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori. *Pertama, apatis* artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua, spektator* artinya orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu. *Ketiga, gladiator* artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan tatap muka,

aktivis partai dan pekerja kampanye serta aktivis masyarakat. *Keempat, pengeritik* yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional. Berbeda dengan Milbrath dan Goel, Olsen memandang partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Dia membagi partisipasi politik menjadi enam lapisan, yaitu *pemimpin politik, aktivis politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap, dan informasi politik lainnya kepada orang lain), warga negara, marginal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem politik), dan orang yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik)* (Surbakti, 1992 : 143).

Lain lagi dengan Nazaruddin Sjamsuddin (1988 : 3.23 - 3.25) yang mengategorikan partisipasi politik ke dalam tipologi *dukungan* dan *gugatan terhadap sistem politik*. Bentuk partisipasi politik yang mendukung sistem politik terlihat dari keikutsertaan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pemilu yang dianjurkan pemerintah. Bentuk dukungan semakin nyata apabila anggota masyarakat memilih partai pemerintah di dalam pemilu mau pun melaksanakan setiap anjuran pemerintah. Selanjutnya partisipasi politik yang berbentuk gugatan adalah mengancam atau mengoreksi kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, dalam bentuk protes, demonstrasi atau pun memboikot anjuran pemerintah.

Paparan di atas memberikan petunjuk kepada kita bahwa partisipasi politik dapat mengambil berbagai bentuk dengan ruang lingkup yang sangat luas. Mulai dari pembuatan keputusan politik, artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan politik, pemilu, diskusi politik, keanggotaan dalam partai dan kelompok politik, kontak dengan pejabat politik dan pemerintahan sampai dengan tindakan-tindakan politik dalam bentuk kekerasan seperti demonstrasi, huru-hara, pemberontakan, kudeta, revolusi dan lain-lain.

Partisipasi warga masyarakat termasuk perempuan berada dalam konteks *governance*, yakni relasi antara negara (pemerintah) dan masyarakat (rakyat). Dari sudut pandang negara, partisipasi sebagai bagian dari prinsip demokrasi merupakan

upaya untuk membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan dan responsif. Sementara itu dari sisi masyarakat, partisipasi memberi ruang dan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka, mengembangkan potensi dan prakarsa serta membangun kemandirian masyarakat.

Berbicara tentang makna substantif dari partisipasi, Sutoro Eko (2004) menegaskan bahwa makna terdalam partisipasi adalah *voice*, akses dan kontrol warga masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan yang berhubungan dengan kehidupannya. Lebih jauh Eko (2004) memberi kejelasan terhadap makna substantif partisipasi itu sebagai berikut :

Pertama, *voice* adalah hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Tujuannya mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan agendabersama untuk mengelola kehidupan secara kolektif dan mandiri.

Kedua, akses berarti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena *governance*, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Ada dua hal penting dalam akses : keterlibatan secara terbuka (*inclusion*) dan keikutsertaan (*involvement*). *Inclusion* menyangkut siapa yang terlibat, sedangkan *involvement* berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan berarti ketersediaan ruang dan kemampuan bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses politik, terutama kaum miskin, minoritas, rakyat kecil, perempuan dan lain-lain.

Ketiga, kontrol merupakan kemampuan warga melakukan pengawasan (pemantauan) terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah serta penilaian secara kritis dan reflektif terhadap risiko-risiko atas tindakan mereka.

Beranjak dari pemaparan esensi partisipasi sebelumnya dapat dipahami bahwa keterlibatan perempuan dalam politik akan menempatkan mereka pada posisi yang sebenarnya. Artinya perempuan bukanlah sebagai hamba (*client*) tetapi sebagai warga (*citizen*) sehingga ia adalah pribadi yang utuh dan mempunyai hak untuk memiliki. Selain itu perempuan sebagai bagian dari segmen masyarakat juga akan menjadi *partner* dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan sehingga

memungkinkan bagi dirinya untuk tidak menjadi sekadar objek pasif penerima kebijakan melainkan sebagai subjek aktif menentukan kebijakan.

C. Perempuan dalam Kehidupan Politik

Perempuan dan politik dalam konstruksi budaya merupakan dua domain yang sangat berbeda. Kedudukan dan peranan perempuan berkisar dalam lingkungan domestik, sedangkan politik sebagai hal yang berkaitan dengan kekuasaan selalu diidentikan dengan dunia laki-laki. Dunia ini seolah-olah tabu dimasuki perempuan. Sosialisasi dalam keluarga, baik di masyarakat Barat maupun Timur, selama berabad-abad menempatkan perempuan di luar masalah-masalah yang berkaitan dengan politik dan kekuasaan.

Pandangan yang menyatakan perempuan untuk terus ter subordinat dalam bidang sosial ekonomi dan politik tidak dapat dipertahankan lagi. PBB telah berjasa besar bagi proses perkembangan kedudukan perempuan dengan membentuk badan *The United Nations Committee on the Status of Women*. Dalam Sidang I tanggal 11 Desember 1948 PBB memperingatkan para anggotanya agar membentuk undang-undang yang menjamin persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Indonesia baru meratifikasi Konvensi PBB tentang hak-hak politik perempuan di tahun 1961.

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik di Indonesia telah dimulai sejak sebelum Indonesia belum meraih kemerdekaan. Setelah kemerdekaan kiprah perempuan dalam kehidupan politik semakin terbuka lebar. Jaminan yuridis yang diberikan melalui UUD 1945 adalah merupakan langkah awal bagi perempuan untuk masuk ke dunia publik.

Namun geliat perempuan itu sangat dipengaruhi oleh setting politik penguasa. Di masa parlementer, organisasi perempuan masih mempunyai kebebasan bergerak meskipun masih berada di bawah payung satu partai. Sedangkan di masa Demokrasi Terpimpin, organisasi politik perempuan menjadi berkurang dengan diperkecilnya

jumlah partai politik. Tetapi organisasi perempuan di luar partai tidak dilarang untuk tumbuh. Di masa Orde Baru di mana kekuasaan menjadi sangat terpusat perempuan telah didomestikasi secara sistematis oleh negara. Domestikasi dilakukan melalui tindakan mempolitisasi perempuan, menerapkan ideologi patriarki, mengkooptasi perempuan, menjadikan perempuan sebagai alat mobilisasi politik disamping tentunya pemerintah melalui output yang berupa kebijakan-kebijakannya melakukan regulasi yang ketat terhadap perempuan.

Mempolitisasi perempuan dalam arti menjadikan perempuan sebagai alat mobilisasi politik partai-partai politik. Kegiatan-kegiatan atau organisasi perempuan diarahkan pada kegiatan kesejahteraan sosial dan keluarga sehingga PKK pun disebut sebagai gerakan perempuan non politik. Untuk menjaga harmoni dan kestabilan politik, pemerintah mengkooptasi seluruh bentuk-bentuk perwakilan menurut fungsi dan profesi seperti halnya KOWANI.

Struktur korporatisme menurut *Philippe C. Schmitter* (Alfred Stepan, 1978), diciptakan untuk menjaga harmoni dan mencegah konflik kelas. Dalam sistem korporatisme ini pemerintah berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan aktivitas seluruh organisasi dan menentukan hidup-matinya organisasi. Keadaan ini diperkuat lagi dengan adanya *Panca Tugas* yang dirumuskan oleh Menteri Urusan Peranan Perempuan yaitu (1) sebagai istri yang membantu suami ; (2) sebagai ibu yang mengasuh anak dan mendidik mereka ; (3) sebagai manajer di dalam mengelola rumah tangga sebagai rumah bagi suami dan anak ; (4) sebagai pekerja dalam berbagai sektor ; dan (5) sebagai anggota organisasi (Abdullah, 1997). Dari *Panca Tugas* ini tercermin negara menerapkan ideologi *ibuisme* (Murniati, 1998) yang menempatkan perempuan sebagai ibu utama dalam keluarga, masyarakat maupun negara.

Ideologi tersebut memosisikan perempuan sebagai makhluk yang penuh cinta kasih dan selalu berkorban demi orang lain. Ideologi tersebut kemudian secara

politis dimanipulasi untuk mengontrol akses perempuan terhadap berbagai sumber daya dan mempasifikasi perempuan. Senada dengan konsep *ibuisme*, Mies (Abdullah, 1997) menggunakan istilah *housewifization* untuk menunjukkan suatu kondisi dimana perempuan sebagai ibu rumah tangga dianggap sebagai peran utama sehingga segenap aspek kehidupan perempuan sangat diwarnai oleh anggapan ini.

Ideologi tersebut melokalisasi perempuan seputar aktivitas domestik serta membatasi geraknya di sektor lain. Ideologi *ibuisme* diciptakan oleh negara dalam rangka melestarikan ideologi patriarki yang identik dengan negara dan laki-laki. Patriarki adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peranan penting dalam masyarakat dan pemerintahan serta mencerabut perempuan dari aksesnya terhadap kekuasaan (Mosse dan Anders Uhlin, 1996).

Lahirnya era reformasi membuka peluang bagi kaum perempuan untuk mengubah pandangan-pandangan yang merugikan perempuan. Mengubah pola berpikir yang peka gender dan menuju langkah kongkrit untuk keadilan gender dalam politik. Jika ditelaah lebih lanjut sesungguhnya landasan untuk menghilangkan ketidakadilan gender telah tercantum dalam beberapa peraturan perpolitikan negara kita seperti berikut ini.

- a. UUD 1945 pasal 28 h ayat 2 tentang perlakuan khusus terhadap kelompok marginal.
- b. UU No.68 tahun 1958 menyatakan akan jaminan persamaan hak politik antara perempuan dan laki-laki.
- c. UU No.7 tahun 1984 yang meratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
- d. UU No.39 tahun 1999 tentang HAM yang mengatur hak perempuan.
- e. Tap MPR RI No.VI/2002 yang merekomendasikan pada Presiden untuk kuota 30% bagi perempuan di lembaga pengambilan keputusan.
- f. Rekomendasi Dewan Sosial dan Ekonomi PBB agar negara-negara yang menjadi anggota PBB dapat memenuhi target 30% perempuan untuk duduk dalam lembaga pengambilan keputusan hingga tahun 2000. Bahkan sekarang telah diperbaharui menjadi sebesar 50%, 5 tahun setelah Konferensi Beijing (Isbodroini Suyanto, 2003).

Keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam politik di republik ini sebenarnya bukan hal baru, karena mereka telah ikut serta secara aktif dalam perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia. Perjalanan partisipasi perempuan Indonesia dalam politik dapat ditinjau dari akseptabilitasnya. Akseptabilitasnya dalam politik sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan profesionalitas, hereditas, kekuatan ekonomi serta karena kedudukan suami. Hasil penelitian Agustono dan Emiyanti (1998) tentang perempuan dalam partai politik di Kotamadya Medan mengindikasikan *image of man*, dimana peran perempuan yang duduk di partai semasa Orde Baru banyak dipengaruhi kolusi dan nepotisme atau karena suami, ayah dan saudara laki-laki.

Menurut Vina Salviana (1995) kelangkaan elit politik perempuan berkaitan dengan rendahnya kualitas perempuan sendiri dalam berpolitik. Maksudnya perempuan kurang memiliki greget dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan kepentingan politik dan kondisi ini kemungkinan dipengaruhi sistem patriarki. Rendahnya keterwakilan perempuan di berbagai lembaga legislatif disebabkan oleh beberapa indikator antara lain : (1) pola partisipasi dan rekrutmen perempuan belum jelas ; (2) pola sosialisasi serta pendidikan politik perempuan belum mengakar ; (3) adanya dominasi laki-laki atas perempuan ; (4) faktor intern perempuan itu sendiri yang lebih mementingkan rumah tangga (reproduksi sosial) ; dan (5) tingkat pendidikan perempuan yang relatif rendah. Dari lima faktor ini pola sosialisasi dan pendidikan politik perempuan merupakan kunci pemberdayaan perempuan dalam meraih hak-hak politiknya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman (*insight*) yang menyeluruh (*whole*) dan tuntas (*exhaustive*) mengenai aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian.

Menurut *Masri Singarimbun* (1989) penelitian yang bersifat deskriptif analitis mencoba mencermati gejala sosial secara cermat mengenai satu fenomena sosial tertentu, khususnya fenomena politik. Sedangkan *Vredenberg* (1979) menyebutkan sebagai suatu penelitian sosial yang berupaya menggambarkan realitas sosial yang kompleks dengan konsep-konsep atau teori-teori yang dikembangkan oleh ilmu sosial. Singkatnya, jenis penelitian ini berusaha menjawab apa penjelasan yang terperinci mengenai gejala sosial seperti yang dimaksud dalam pertanyaan penelitian.

B. Responden Penelitian

Responden penelitian diambil secara *purposive random sampling* (Patton, 1990) dengan menggunakan *criterion based selection* artinya peneliti menetapkan responden penelitian berdasarkan kebutuhan, terutama dalam menentukan siapa yang akan menjadi responden dan berapa jumlahnya. Sehubungan dengan hal ini maka responden penelitian ini adalah perempuan dengan tingkat pendidikan SMA/sederajat. Jumlah responden ditentukan dengan *quota sampling* yaitu 45 orang yang terdistribusi pada tiga kecamatan dengan kriteria jauh-dekatnya kecamatan tersebut dengan pusat kegiatan pemerintahan. Selanjutnya untuk setiap kecamatan diwakili oleh satu kelurahan di mana Kelurahan Purus Kebun untuk Kecamatan

Padang Barat, Air Tawar Barat untuk Padang Utara dan Lubuk Buaya untuk Koto Tangah. Dengan demikian jumlah responden untuk masing-masing kelurahan sebanyak 15 orang.

C. Definisi Operasional Variabel

Untuk lebih mengarahkan data yang dikumpulkan dalam menemukan jawaban pertanyaan penelitian ini, maka diperlukan definisi operasional dari variabel penelitian sebagai berikut :

1. Perilaku pemberian suara

Perilaku pemberian suara adalah tindakan memilih yang berakibat memihaknya pemilih pada suatu partai politik yang menjadi kontestan pemilu.

2. Akses

Akses berarti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena *governance*, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Ada dua hal penting dalam akses : Keterlibatan secara terbuka (*inclusion*) dan keikutsertaan (*involvement*). *Inclusion* menyangkut siapa yang terlibat, sedangkan *involvement* berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan berarti ketersediaan ruang dan kemampuan bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses politik.

3. Kontrol

Kontrol merupakan kemampuan warga melakukan pengawasan (pemantauan) terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah serta penilaian secara kritis dan reflektif terhadap risiko-risiko atas tindakan mereka.

D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang langsung dari responden terdiri dari data : (1) perilaku pemberian suara ; (2) akses (keterlibatan) ; dan (3) kontrol responden dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang. Disamping itu juga data sekunder mengenai hal-hal yang menunjang upaya pengungkapan jawaban dan pertanyaan penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi.

Teknik pengumpul data dilakukan melalui angket dan wawancara mendalam (*depth interview*). Alat yang digunakan adalah daftar pertanyaan bersifat terbuka dan tertutup serta pedoman wawancara.

E. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji kredibilitas data digunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Menurut Patton, triangulasi dapat dilakukan dengan dua strategi yaitu : (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data ; dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan menggunakan metoda yang sama. Pada penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan strategi pertama.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber data diolah secara kualitatif. Langkah utama adalah membuat klasifikasi yaitu merumuskan kategori-kategori yang terdiri dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama sampai kepada penafsiran arti dari jawaban (Vredenberg, 1979). Penafsiran dan interpretasi data merupakan proses

pemberian makna pada analisis dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Model yang digunakan dalam analisis adalah model interaktif seperti yang digambarkan oleh Miles dan Huberman (1979) sebagai berikut :

1. Reduksi data.

Data yang terkumpul dalam penelitian direduksi guna menajamkan analisis, menonjolkan hal-hal yang penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan, dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang bermakna.

2. Penyajian data.

Penyajian data merupakan proses penggambaran dari keseluruhan kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh sehingga peneliti dapat memahami jawaban dari permasalahan yang diteliti.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Data yang telah diperoleh dan diolah kemudian disimpulkan sesuai dengan klasifikasi data menuju suatu konfigurasi yang utuh.

4. Merumuskan temuan.

Temuan-temuan yang diperoleh dari penarikan kesimpulan melalui analisis data, dirumuskan menjadi temuan umum dan temuan khusus.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pada bagian ini akan dipaparkan : *Pertama*, perilaku pemberian suara perempuan dalam pemilu legislatif 2004. *Kedua*, akses atau keterlibatan perempuan dalam pemilu legislatif 2004, dan *ketiga*, kontrol yang dilakukan perempuan dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang.

Sebelum membahas lebih lanjut tiga hal utama tersebut, maka berikut digambarkan pula bagaimana karakteristik responden berdasarkan umur, pekerjaan dan tingkat pendidikan. Gambaran tentang umur responden dalam penelitian ini terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1 : Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur (tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
1.	17 - 22	8	17,77
2.	23 - 28	12	26,67
3.	29 - 34	15	33,33
4.	35 - 40	6	13,33
5.	> 40	4	8,9
J u m l a h		45	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa proporsi terbesar dari responden berada pada umur 29 -34 tahun yaitu 33,33%, kemudian umur 23 – 28 tahun 26,67%, 17 – 22 tahun 17,77%, umur 35 – 40 tahun 13,33%, dan hanya 8,9% saja berumur > 41 tahun. Sedangkan gambaran tentang pekerjaan responden terangkum pada tabel 2.

Tabel 2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Rumah tangga	18	40
2.	Mahasiswi	12	26,66
3.	Swasta	11	24,44
4.	PNS	4	8,9
		45	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Beranjak dari data empiris tabel 2, terlihat bahwa sebagian besar (40%) responden adalah ibu rumah tangga, sementara itu yang menyatakan pekerjaannya mahasiswi dan swasta berimbang, dengan proporsi masing-masing 26,66% dan 24,44%. Hanya 8,9% saja yang memiliki pekerjaan sebagai PNS. Sementara itu bagaimana penyebaran responden ditinjau dari tingkat pendidikan terangkum pada tabel 3.

Tabel 3 : Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Perguruan Tinggi	14	31,11
2.	Sekolah Menengah	25	55,55
3.	Sekolah Dasar	6	13,34
		45	100

Sumber : Diolah dari data primer

Tabel 3 menunjukkan bahwa lapisan terbesar dari responden berpendidikan sekolah menengah yaitu sebesar 55,55%, disusul kemudian berpendidikan tinggi 31,11 % dan hanya 13,34% yang berpendidikan sekolah dasar

Pemaparan berikut ini berhubungan dengan tiga persoalan utama yang menjadi fokus kajian penelitian ini yaitu (1) perilaku pemberian suara ; (2) akses perempuan dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang ; dan (3) kontrol perempuan dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang .

1. Perilaku Pemberian Suara Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang

Untuk mengetahui bagaimana perilaku pemberian suara perempuan dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang dijangkau melalui pertanyaan yang terkait dengan : (a) partai apa yang menjadi pilihan perempuan dalam pemilu legislatif 2004 ; (b) kandidat (caleg atau calon anggota DPD) yang perempuan atau laki-laki yang menjadi pilihan mereka ; dan (c) apa alasan mereka memilih partai tersebut bila ditinjau dari sudut sosiologis dan psikologis.

Distribusi jawaban responden diungkapkan melalui tabel 4,5, dan 6 berikut ini.

Tabel 4 : Partai Pilihan Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2004

No.	Nama Partai Politik	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Partai Keadilan Sejahterta (PKS)	8	17,77
2.	Partai Golongan Karya (Golkar)	8	17,77
3.	Partai Amanat Nasional (PAN)	10	22,22
4.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	4,44
5.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	4	8,88
6.	Partai Demokrat (PD)	10	22,22
7.	Partai Bulan Bintang (PBB)	2	4,44
8.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	2,26

Sumber : Diolah dari data primer.

Tabel di atas memperlihatkan dari 24 partai politik yang menjadi kompetitor pemilu legislatif 2004, ternyata hanya delapan partai yang menjadi pilihan responden. Temuan empiris menunjukkan bahwa PAN dan PD ternyata lebih populer di mata perempuan dibanding yang lainnya. Keduanya meraup suara 22,22%, disusul PKS dan Golkar yang juga berimbang yaitu 17,77%. Sementara itu PDI-P meraih suara 8,88%, sedangkan PPP dan PBB sama-sama memperoleh 4,44% suara. Hanya 2,26% saja yang memilih PKB.

Selanjutnya apakah yang menjadi pilihan responden adalah kandidat (caleg dan calon anggota DPD) perempuan atau laki-laki? Jawabannya terangkum pada tabel di bawah ini.

Tabel 5 : Kandidat Caleg dan Calon Anggota DPD Pilihan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Pilihan Kandidat	Kategori Pilihan	
		Perempuan	Laki-laki
1.	Calon Legislatif	14 (31,11%)	31 (68,89%)
2.	Calon Anggota DPD	3 (6,66%)	42 (93,34%)

Sumber : Diolah dari data primer.

Temuan empiris yang ada pada tabel 5 menegaskan bahwa pilihan terbesar responden baik untuk kandidat (caleg mau pun calon anggota DPD) terbesar adalah kandidat yang berjenis kelamin laki-laki dibanding perempuan. Sebarannya untuk kandidat caleg dan kandidat DPD laki-laki adalah 68,89% dan 93,34%. Hanya

31,11% yang memilih kandidat caleg perempuan dan 6,66% saja yang memilih kandidat DPD perempuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa ternyata responden lebih percaya terhadap kandidat laki-laki ketimbang perempuan itu sendiri dalam pemilu legislatif 2004 yang lalu di Kota Padang.

Selanjutnya untuk mengetahui apa alasan responden memilih suatu partai dapat dicermati melalui sebaran jawaban yang ada pada tabel 6.

Tabel 6 : Alasan Responden Memilih Partai Politik dalam Pemilu Legislatif 2004

No.	Alasan	Kategori Jawaban		Jumlah
		Ya	Tidak	
1.	Karena partai tersebut memperjuangkan kepentingan perempuan.	10 (22,22%)	35 (77,78%)	45 (100%)
2.	Karena partai tersebut adalah partai yang disegani dan merasa terikat padanya.	40 (88,88%)	5 (11,12%)	45 (100%)
3.	Karena partai tersebut hendak memperjuangkan nasib umat Islam.	10 (22,22%)	35 (77,78%)	45 (100%)
4.	Karena partai tersebut merupakan partai yang reformis.	38 (84,44%)	7 (15,56%)	45 (100%)
5.	Karena partai tersebut sesuai dengan aspirasi.	35 (77,78%)	10 (22,22%)	45 (100%)
6.	Karena partai tersebut adalah pilihan orang tua.	0 (0%)	45 (100%)	45 (100%)
7.	Karena partai tersebut pilihan atasan.	2 (4,65%)	43 (95,35%)	45 (100%)
8.	Karena memperoleh pendidikan di lingkungan yang dekat dengan partai tersebut.	4 (8,88%)	41 (91,12%)	45 (100%)
9.	Karena menjadi pengurus partai tersebut.	0 (0%)	45 (100%)	45 (100%)
10.	Karena pengurus partai tersebut adalah teman dekat.	4 (8,88%)	41 (91,12%)	45 (100%)
11.	Karena sering terlibat dalam kegiatan partai tersebut.	0 (0%)	45 (100%)	45 (100%)

Sumber : Diolah dari data primer.

Berdasarkan temuan empiris sebelumnya, terdapat tiga alasan yang menonjol mengapa responden memberikan suaranya pada partai tertentu. Ketiga alasan tersebut sebagai berikut : *Pertama*, partai pilihannya adalah partai yang disegani dan responden merasa terikat padanya. Ini ditunjukkan oleh 88,88% jawaban responden yang berada pada kategori ini. *Kedua*, partai pilihannya adalah partai yang reformis

(84,44%), dan alasan *ketiga*, adalah kebanyakan responden (77,78%) menyatakan bahwa partai pilihan tersebut sesuai dengan aspirasinya.

Selanjutnya melalui tabel yang sama juga dapat dilacak *ketidaksetujuan* responden terhadap alasan-alasan berikut sebagai pijakannya dalam menentukan pemberian suara. Alasan tersebut adalah partai akan memperjuangkan kepentingan perempuan, partai akan memperjuangkan nasib umat Islam. Kedua alasan ini ditolak oleh sejumlah responden dengan proporsi yang sama yaitu 77,78%. Sementara itu pernyataan bahwa pilihannya didasarkan atas pilihan atasan juga ditolak oleh mayoritas responden (95,35%). Penolakan juga terjadi oleh mayoritas responden terhadap alasan-alasan berikut ini, karena teman dekatnya menjadi pengurus partai dan mendapatkan pendidikan di lingkungan yang dekat dengan partai tersebut. Proporsi jawaban kedua alasan ini sama yaitu 91,12%. Bahkan semua responden (100%) juga menolak kalau dinyatakan pilihannya atas partai disebabkan oleh menjadi pengurus partai mau pun karena sering terlibat dalam kegiatan partai tersebut.

Bila ditilik lebih lanjut faktor apakah yang menjadi penentu dari pilihan responden dalam pemilu legislatif 2004? Pertanyaan kritis ini sebenarnya bisa dijadikan basis untuk mengidentifikasi pemilih rasional-otonom dengan pemilih tradisional-mobilisasi. Pemilih rasional-otonom adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu karena didasari pertimbangan dan kesadaran sendiri, misalnya dengan memperhatikan program-program partai. Sebaliknya pemilih tradisional-mobilisasi adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya karena dimobilisasi oleh orang lain, dan tidak peduli akan pertimbangan rasional.

Tabel 7 memberi gambaran yang gamblang tentang dua tipe pemilih tersebut. Dalam tabel tersebut terlihat sebagian besar responden yaitu sebesar 66,67% tergolong pemilih rasional-otonom, karena memilih atas dasar pertimbangannya sendiri. Mereka menentukan pilihannya relatif kebal (*immune*) terhadap intervensi,

tekanan, atau pun paksaan dari pihak lain. Sisanya 33,33% tergolong pada pemilih tradisional-mobilisasi. Sebab pilihan mereka didasari oleh saran dari keluarga, pengaruh teman sejawat, dan pengaruh lingkungan kerja. Ketiga faktor penentu tersebut mempunyai proporsi yang sama yaitu 11,11%. Sekali pun demikian tidak satu pun dari responden yang menyatakan bahwa pilihannya merupakan hasil dari tekanan (mobilisir) pihak lain.

Tabel 7 : Faktor Penentu Pilihan Partai Responden dalam Pemilu Legislatif 2004

No.	Faktor Penentu	Jumlah
1.	Pertimbangan sendiri	30 (66.67%)
2.	Saran dari keluarga	5 (11,11%)
3.	Pengaruh teman sejawat	5 (11,11%)
4.	Pengaruh lingkungan keluarga	5 (11,11%)
5.	Tekanan (mobilisir) pihak lain	0 (0%)
J u m l a h		45 (100%)

Sumber : Diolah dari data primer.

Sehubungan dengan hal ini, Afan Gaffar (1992) menyatakan bahwa membesarnya pemilih otonom disebabkan oleh berkurangnya tingkat ketergantungan masyarakat secara politik dan ekonomi pada negara. Disamping itu juga ditandai oleh kebebasan massa yang bergulir sejak reformasi politik yang berakibat tiadanya intimidasi atau intervensi serta memungkinkan setiap pemilih menyalurkan aspirasi politiknya terhadap partai mana pun.

2. Akses atau Tingkat Keterlibatan Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang

Akses menurut Eko (2004) adalah bagian dari makna substantif partisipasi politik. Akses berarti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena *governance* yaitu mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Ada dua hal penting dalam akses yaitu : *Pertama, inclusion* atau keterlibatan masyarakat secara terbuka yaitu menyangkut siapa yang terlibat. *Kedua, involvement* atau keikutsertaan yang berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan berarti ketersediaan ruang dan kemampuan bagi

siapa saja untuk terlibat dalam proses politik, terutama kaum miskin, minoritas, rakyat kecil, perempuan, dan lain-lain.

Untuk mengetahui bagaimana akses atau keterlibatan responden dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang dicermati melalui penjarangan jawaban responden terhadap hal-hal sebagai berikut : (a) akses pada tahap pemungutan dan penghitungan suara meliputi ikut memilih, menjadi panitia pelaksana pemungutan suara, terlibat dalam proses penghitungan suara, menjadi saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara ; (b) akses pada tahapan kampanye meliputi menjadi juru kampanye, panitia pelaksana, menjadi simpatisan/penggembira, menjadi tim sukses kandidat, dan memperjuangkan isu-isu pemberdayaan perempuan ; (c) akses terhadap partai politik meliputi terdaftar sebagai anggota partai, menjadi pengurus partai, menjadi relawan partai, dan mengikuti proses rekrutmen caleg oleh partai.

Tabel 8 : Akses atau Keterlibatan Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang

No.	Jenis Akses	Kategori Jawaban	
		Terlibat	Tidak terlibat
1.	Tahap pemungutan dan penghitungan suara		
	a. ikut memilih dalam pemilu	45 (100%)	0 (0%)
	b. menjadi panitia pelaksana pemungutan suara	2 (4,44%)	43 (95,56%)
	c. terlibat dalam proses penghitungan suara	2 (4,44%)	43 (95,56%)
	d. menjadi saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.	2 (4,44%)	43 (95,56%)
2.	Tahap kampanye		
	a. menjadi juru kampanye	0 (0%)	45 (100%)
	b. menjadi panitia pelaksana	0 (0%)	45 (100%)
	c. menjadi simpatisan/penggembira	28 (62,22%)	17 (37,78%)
	d. menjadi tim sukses kandidat	2 (4,44%)	43 (95,56%)
	e. memperjuangkan isu pemberdayaan perempuan	2 (4,44%)	43 (95,56%)
3.	Terhadap partai politik		
	a. terdaftar sebagai anggota	5 (11,11%)	40 (88,89%)
	b. menjadi pengurus partai	0 (0%)	45 (100%)
	c. menjadi relawan partai	5 (11,11%)	40 (88,89%)
	d. mengikuti proses rekrutmen caleg oleh partai	0 (0%)	45 (100%)

Sumber : Diolah dari data primer.

Data empiris tentang akses atau keterlibatan perempuan dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang menunjukkan bahwa terdapat dua jenis akses yang terlihat tinggi yaitu akses atau keterlibatan dalam memilih (melakukan pemberian suara), dimana semua responden (100%) menyatakan telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif tersebut. Sementara itu menjadi simpatisan/penggembara suatu partai dinyatakan oleh sejumlah 62,22% responden. Sedangkan jenis akses yang lain terlihat sangat rendah sekali, terutama sekali dalam hal-hal yang menuntut kecakapan/*skill* politik tertentu. Akses yang rendah tersebut berhubungan dengan hal-hal seperti menjadi panitia pelaksana pemungutan suara, terlibat dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, menjadi juru kampanye, menjadi tim sukses kandidat, memperjuangkan isu-isu pemberdayaan perempuan dalam kampanye. Sedangkan akses terhadap partai politik juga rendah pada hampir semua elemen pencermatan tentang hal-hal terkait dengan terdaftar sebagai anggota, menjadi pengurus partai, menjadi relawan partai, terlebih mengikuti proses rekrutmen caleg oleh partai.

Dari keseluruhan akses yang terjaring ternyata keterlibatan responden yang terbesar adalah dalam *moment* pemberian suara. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat keterlibatan (akses) perempuan dalam pemilu berada pada hirarkhi terendah.

Menarik untuk mencermati pendapat responden tentang tingkat keterlibatan (akses) perempuan dalam pemilu.

“Keterlibatan perempuan dalam pemilu terbatas hanya pada even yang memungkinkan waktu perempuan untuk terlibat. Hal ini terutama dalam proses pemberian suara. Waktunya hanya sebentar. Kalau kampanye selain waktunya lama juga cukup berisiko pada diri sendiri atau pun keluarga. Terlebih lagi bila ingin terlibat dalam partai, kecil sekali kesempatannya karena rapat-rapat partai sering dadakan dan diselenggarakan pada malam hari.” (Wawancara dengan responden RI).

Selain faktor waktu sebagai salah satu faktor yang menghalangi intensitas keterlibatan perempuan dalam pemilu, faktor minat juga mengemuka dari pendapat responden mengenai bagaimana caranya mereka ikut terlibat (*involvement*).

“Bagaimana kita akan banyak ikut terlibat dalam dunia politik pada umumnya atau pemilu pada khususnya apabila secara umum kita tidak tertarik pada politik. Orang selalu memandang negatif tentang politik. Politik itu kotor, kejam, keras, dan hitam. Terlebih lagi masyarakat kita lebih memandang tugas perempuan itu di rumah atau urusan privat sementara bicara politik itu menyangkut urusan publik, bertentangan dengan urusan kita.” (Wawancara dengan responden ES).

3. Kontrol Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang

Kontrol merupakan kemampuan warganegara untuk melakukan pengawasan (pemantauan) terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah serta penilaian secara kritis reflektif terhadap risiko-risiko atas tindakan mereka.

Dalam hal ini penjangkaran kontrol perempuan dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang melalui pengungkapan hal-hal sebagai berikut : (a) pertimbangan dalam memilih kandidat caleg dan kandidat DPD ; (b) saksi dalam pemilu ; (c) pemantau dalam pemilu ; (d) mempelajari program partai politik khususnya yang memberdayakan perempuan ; (e) menentukan kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu di TPS setempat ; dan (f) mengawasi peluang terjadinya *money politic* dalam seluruh kegiatan pemilu.

Tabel 9 : Kontrol Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang

No.	Jenis Kontrol	Pernyataan	
		Ada	Tidak ada
1.	Pertimbangan dalam memilih kandidat	30 (66,67%)	15 (33,33%)
2.	Saksi dalam pemilu	2 (4,44%)	43 (95,56%)
3.	Pemantau dalam pemilu	3 (6,66%)	42 (93,34%)
4.	Mempelajari program partai khususnya isu pemberdayaan perempuan	2 (4,44%)	43 (95,56%)
5.	Menentukan kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu di TPS setempat	2 (4,44%)	43 (95,56%)
6.	Mengawasi peluang terjadinya <i>money politic</i>	3 (6,66%)	42 (93,34%)

Sumber : Diolah dari data primer.

Kontrol perempuan dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang berdasarkan data tabel 9 dapat dikatakan lemah. Hanya satu jenis kontrol yang bisa dilakukan yaitu saat memberikan pertimbangan untuk memilih kandidat. Sebagian besar responden sudah bisa mengontrol sendiri ke mana dan kepada siapa mereka

memberikan suaranya melalui pertimbangan-pertimbangan yang berasal dari diri sendiri. Kontrol dalam melakukan pilihan adalah sesuatu yang esensial dalam politik. Terutama dalam sejarah panjang perjuangan perempuan untuk eksis dalam mempertahankan hak politiknya. Kenyataan empiris ini ternyata merupakan buah dari adanya reformasi politik yang telah membuka pikiran perempuan akan pentingnya kemandirian dalam memilih, sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang responden.

"Setelah mengikuti dua kali pemilu di masa reformasi ini terlihat bahwa kaum perempuan sudah bisa lebih mandiri menentukan pilihannya kepada siapa dan kepada partai apa ia harus memberikan suaranya. Tidak ada lagi intervensi atau tekanan dari luar seperti atasan, keluarga atau suami dan yang paling penting kami tidak lagi dimobilisasi ataupun mengalami "serangan fajar" sebagaimana biasanya terjadi." (Wawancara dengan responden NN).

Namun kemandirian yang menggembirakan ini tidak diikuti oleh kontrol yang baik terhadap pelaksanaan pemilu itu sendiri. Penjaringan hal ini terhadap responden ternyata mengungkapkan bahwa secara umum dalam lima tema kontrol yang diamati, responden tidak mampu melakukan kontrol yang seharusnya bisa mereka lakukan. Lemahnya kontrol responden ditunjukkan oleh sebaran jawabannya yang hanya 4,44% menjadi saksi dalam pemilu, 6,66% menjadi pemantau pemilu, 4,44% pula yang mampu mempelajari program partai politik serta menentukan kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu. Di sisi lain hanya 6,66% saja yang mampu melakukan kontrol bagi kemungkinan terjadinya *money politic*.

Kondisi ini ternyata tidak jauh berbeda dari penjaringan jawaban responden terhadap akses mereka dalam pemilu. Bila ditinjau lebih jauh beberapa responden mengungkapkan bahwa kontrol yang mereka lakukan sangat lemah sekali karena kebanyakan dari responden takut menanggung risiko dalam kegiatan-kegiatan yang dijadikan indikator dalam mencermati intensitas kontrol. Disamping faktor risiko, faktor lain yang cukup berpengaruh terhadap lemahnya kontrol perempuan adalah faktor waktu dan pengetahuan perempuan itu sendiri. Terutama dalam mempelajari program partai politik khususnya terkait dengan isu pemberdayaan perempuan.

Terlihat sekali hanya 4,44% diantara mereka yang mampu untuk ini. Lemahnya kontrol perempuan dalam mengetahui program-program partai politik atau partai politik mana yang memperjuangkan program pemberdayaan perempuan dikemukakan oleh salah seorang responden sebagai berikut :

“Ada banyak faktor yang mungkin berakibat lemahnya kontrol perempuan dalam mengetahui partai mana yang memperjuangkan program pemberdayaan perempuan seperti rendahnya tingkat pengetahuan perempuan atau kurangnya waktu bagi perempuan untuk mempelajari sendiri program-program partai tersebut. Terlepas dari hal ini ternyata partai politik juga memegang peranan kunci sehubungan dengan lemahnya kontrol perempuan dalam mengetahui program-program partai. Lihat saja dalam realitanya, partai akan mendekati masyarakat (bersosialisasi) hanya menjelang pemilu. Itu pun kalau kampanye cenderung dilakukan kegiatan seremonial, hura-hura atau yang sejenisnya.” (Wawancara dengan AT).

B. Pembahasan

Perilaku pemberian suara adalah tindakan memilih yang merupakan refleksi identifikasi kepartaian dan bermuara kepada preferensi politik individu memilih partai politik tertentu dalam suatu pemilu. Selama ini pemilu-pemilu yang digelar pada masa Orde Baru sangat berperan dalam memobilisasi perempuan untuk memberikan suaranya pada partai pemerintah. Realitas ini telah dilegalisasi oleh kepolitikan Orde Baru sepanjang 30 tahun lebih untuk mempertahankan status quo. Uhlin (1997) mengungkapkan struktur hubungan gender dalam kepolitikan Orde Baru telah turut berperan dalam menyokong otoritarianisme di Indonesia. Disamping dimobilisasi perilaku pemberian suara perempuan juga dipengaruhi oleh intervensi kerabat dekat dan kebijakan massa mengambang.

Perilaku pemberian suara perempuan dalam pemilu legislatif 2004 ternyata telah bergeser seiring pergeseran format politik. Perubahan format politik di era reformasi pada akhirnya telah membawa perubahan dalam perilaku pemberian suara perempuan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa 66,67% responden memilih secara rasional-otonom atau memilih berdasarkan pertimbangan sendiri dan sisanya terklasifikasi ke dalam pemilih tradisional-mobilisasi karena dipengaruhi oleh saran

keluarga, teman sejawat dan lingkungan kerja. Yang menarik adalah tidak satu pun di antara mereka yang merasa terintimidasi untuk melakukan pilihannya.

Selanjutnya kepada partai apa pilihan mereka jatuhkan? Temuan penelitian menunjukkan partai unggulan perempuan dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang adalah Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat. Sementara itu rangking kedua ditempati oleh Partai Golkar dan PKS. Fenomena ini menunjukkan rasionalisasi pilihan responden terhadap partai. Partai yang mereka unggulkan (yang menjadi pilihan) adalah partai reformis yang berupaya membawa ke arah Indonesia baru. Hanya saja satu hal yang cukup mengejutkan ternyata Partai Golkar masih eksis di mata perempuan sekali pun menempati urutan kedua pilihan responden.

Sayangnya rasionalisasi pilihan responden terhadap partai tidak diikuti oleh kesadaran gender yang seharusnya mereka miliki dalam menentukan kandidat caleg mau pun kandidat DPD. Pilihan mereka umumnya bukanlah perempuan, kaumnya sendiri. Rendahnya kesadaran gender responden juga tercermin dari jawabannya terhadap alasan menentukan pilihan atas partai tertentu ditinjau dari sudut sosiologis dan psikologis. Dari salah satu indikator pencermatan tergambar bahwa hanya 22,22% responden yang memilih partai karena partai tersebut memperjuangkan kepentingan perempuan.

Kesadaran gender (*gender awareness*) umumnya akan terbentuk apabila pengetahuan dan pemahaman perempuan terhadap perannya dalam politik serta pentingnya pemberdayaan perempuan di bidang politik telah membudaya di dalam pribadi perempuan itu sendiri. Tanpa kesadaran ini mustahil dilakukan peningkatan dan pemberdayaan peran perempuan di bidang politik.

Menarik untuk mencermati penelitian Rosenthal (1995) yang menunjukkan bahwa adanya preferensi politik berdasarkan perbedaan seks atau gender. Ia mengemukakan bahwa para pemilih perempuan lebih suka memilih kandidat sesama perempuan, bahkan diantara perempuan sendiri terdapat perbedaan preferensi pilihan

politik berdasarkan kesadaran gender. Lebih lanjut penelitian Cook (1993) menunjukkan bahwa perempuan yang mempunyai kesadaran feminisme cukup besar berbeda dengan wanita yang kurang memiliki kesadaran feminisme dalam hal sikap dan nilai politik, khususnya perbedaan dalam memilih kandidat dan pilihan politiknya pada saat pemilu.

Hal lain yang menonjol dalam alasan responden untuk menentukan pilihannya adalah tiga hal berikut: (1) partai pilihan merupakan partai yang disegani serta merasa terikat padanya ; (2) partai pilihan merupakan partai yang reformis ; dan (3) partai yang mereka pilih sesuai dengan aspirasinya. Tiga alasan ini telah menunjukkan bahwa perilaku pemberian suara responden sebagian besar telah bergeser dari pemilih tradisional-mobilisasi ke pemilih rasional-otonom dengan alasan-alasan pemilihan yang mencerminkan bahwa pergeseran format politik telah berimplikasi terhadap perilaku pemberian suara. Namun sayangnya perilaku pemberian suara sebagian besar responden tidak memiliki kesadaran gender yang tinggi.

Terlepas dari ada tidaknya kesadaran gender yang dimiliki oleh responden tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini relasi hubungan gender dikungkung oleh budaya patriarkhi yang menganggap laki-laki superior terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan baik domestik mau pun publik. Patriarkhi adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peranan penting dalam masyarakat dan pemerintahan serta mencerabut perempuan dari aksesnya terhadap kekuasaan (Mosse, 1996).

Budaya patriarkhi yang dominan tumbuh diwarnai pula oleh budaya di mana perempuan itu berada. Budaya Minangkabau mengkonstruksikan posisi perempuan terhormat untuk urusan internal seperti kaum, suku, rumah gadang dengan berbagai sebutan seperti *limpapeh rumah gadang*, *bundo kanduang* yang perannya secara

empiris sejak dulu hanya berkuat pada urusan-urusan yang erat dengan tugas dan kewajiban seorang perempuan.

Konstruksi budaya yang demikian kemudian diikuti pula dengan karakter struktur dan sistem yang tidak mendukung keberadaan perempuan dalam politik, belum lagi pro dan kontra pandangan agama tentang keterlibatan perempuan dalam politik dan ditambah lagi dengan faktor inheren dari perempuan itu sendiri. Kesemuanya itu merupakan hal yang menentukan bagaimana sesungguhnya relasi antara perempuan dan politik. Relasi antara perempuan dan politik dapat kita cermati melalui akses atau tingkat keterlibatan dan kontrol mereka dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hanya pada jenis akses ikut memilih dalam pemilu dan ikut menjadi simpatisan/penggembara saja keterlibatan perempuan yang tinggi. Sedangkan sisanya (sebanyak 11 jenis akses) sangatlah memprihatinkan. Akses tersebut yaitu : (1) menjadi panitia pelaksana pemungutan suara ; (2) terlibat dalam proses penghitungan suara ; (3) menjadi saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara ; (4) menjadi juru kampanye ; (5) menjadi panitia pelaksana kampanye ; (6) menjadi tim sukses kandidat ; (7) memperjuangkan isu-isu pemberdayaan perempuan ; (8) terdaftar sebagai anggota partai ; (9) menjadi pengurus partai ; (10) menjadi relawan partai ; dan (11) mengikuti proses rekrutmen caleg oleh partai.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa walau pun sistem politik berubah namun tingkat keterlibatan atau akses perempuan pada aktifitas politik hanya menunjukkan akses yang berarti (berubah) pada akses pemberian suara yaitu dari akses ikut memilih berdasarkan pengaruh orang lain menjadi ikut memilih berdasarkan pilihan sendiri (otonom).

Sementara untuk jenis akses lainnya tidak dapat dilakukan oleh responden dengan berbagai alasan. Bila dicermati lebih lanjut distribusi jawaban responden

sangat rendah pada jenis akses yang memerlukan keterampilan/skill politik seperti menjadi panitia pelaksana pemungutan suara, ikut dalam proses penghitungan suara, menjadi juru kampanye, menjadi panitia pelaksana kampanye, menjadi tim sukses kandidat, dan yang lainnya.

Tingginya akses perempuan dalam pemberian suara (ikut memilih) dalam pemilu sejalan dengan pernyataan responden berikut :

“Bila kita amati, pada tahap pemberian suara terlihat bagi kita antusiasme orang berbondong-bondong ke TPS-TPS terdekat. Kehadiran pemilih pada setiap TPS-TPS di kota Padang bisa diperkirakan 95% dari mereka yang mendaftar untuk ikut pemilu.” (Wawancara dengan RS).

Bila dilihat tingkat kehadiran pemilih dalam pemilu-pemilu Orde Baru dapat dikategorikan tinggi. Menurut Syamsuddin (1998) rata-rata tingkat kehadiran mereka 90%. Sedangkan menurut Dhakidae kehadiran pemilih untuk pemilu 1955 adalah sebesar 87,65% (Rais, 1986). Tingginya tingkat kehadiran pemilih dalam pemilu-pemilu Orde Baru secara substansial berbeda dengan tingginya tingkat kehadiran pemilih pada masa pemilu era reformasi yaitu pemilu 1999 sebesar 95,40% dan pemilu 2004 di atas 96%. Perbedaannya terletak pada sifat pemilih itu sendiri. Pada pemilu-pemilu Orde Baru perempuan ikut memilih banyak didasari oleh pertimbangan di luar dirinya sendiri seperti ikut suami, ayah, atasan, atau dimobilisasi dan diintimidasi (Salviana, 1995) sedangkan di era reformasi sifat pemilih perempuan sudah berubah pada pertimbangan yang berasal dari diri sendiri (rasional-otonom).

Bila dilihat di negara-negara lain, di Amerika umumnya persentase kehadiran pemilih dalam pemungutan suara lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa Barat. Di negara-negara Eropa Barat seperti Perancis dan Inggris pada tahun 1974 mencapai 80,9% dan 72,8%. Sementara di Nederland 86,1% (Budiardjo, 1981). Rendahnya kehadiran pemilih pada waktu pemberian suara di Amerika tidak sebanding dengan perjuangan panjang pengakuan hak pilih yang diberikan untuk kaum marjinal termasuk perempuan dan kulit hitam. Sejak konstitusi ditandatangani

pada tahun 1787 hanya penduduk kulit putih dan kaya saja yang menikmati hak pilih dan dipilih. Selanjutnya syarat kekayaan itu dihapus pada awal abad ke 19. Adapun perempuan, berhak memilih sejak 1920, namun kulit hitam Amerika baru menikmati hak pilih penuh di Amerika bagian selatan setelah muncul gerakan hak-hak sipil pada tahun 1960-an. Akhirnya tahun 1971 penduduk muda mendapatkan hak pilih ketika Amerika Serikat menurunkan umur hak pilih dari 21 menjadi 18 tahun.

Sementara di Indonesia, hak memilih telah diberikan kepada warga negaranya sejak Indonesia merdeka. Para pembentuk negara sudah sejak semula menyadari akan pentingnya *political franchise* yang menyeluruh bagi warganya. Semua warga negara yang dianggap dewasa memiliki hak pokok yang sama tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, suku, agama, jenis kelamin mau pun unsur-unsur kedaerahan lainnya.

Rendahnya akses atau tingkat keterlibatan perempuan dalam pemilu (kecuali pada akses ikut memilih) ternyata paralel dengan kontrol yang mereka lakukan. Temuan penelitian menunjukkan dari enam jenis kontrol yang diamati hanya pada kontrol *pertimbangan dalam memilih kandidat* saja yang baik. Sementara itu sisanya yaitu kontrol mereka sebagai saksi dan pemantau dalam pemilu, mempelajari program partai politik yang memberdayakan perempuan, menentukan kesalahan-kesalahan pada penyelenggaraan pemilu di TPS setempat, dan kontrol terhadap peluang terjadinya *money politic* ditemukan sangat lemah.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa walau pun terdapat pergeseran perilaku pemberian suara perempuan dalam pemilu legislatif 2004 bila dibandingkan dengan pemilu-pemilu masa Orde Baru namun tidak diikuti oleh tingginya akses dan kontrol yang mereka lakukan dalam penyelenggaraan pemilu khususnya pada penjangkaran akses dan kontrol yang dicermati dalam penelitian ini.

Akses dan kontrol merupakan bagian dari substansi partisipasi politik. Menurut Milbrath dan Goel, partisipasi politik baik dalam bentuk akses dan kontrol

pada umumnya dapat dikategorikan ke dalam empat jenis yaitu : (1) apatis, yaitu orang-orang yang menarik diri dari proses politik ; (2) spektator, yaitu orang yang setidak-tidaknya pernah ikut pemilu ; (3) gladiator, yaitu orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik ; dan (4) pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk non konvensional seperti mengajukan petisi, mogok, unjuk rasa dan demonstrasi (Sastroatmodjo, 1995).

Bila merujuk pada pendapat Milbrath dan Goel, ternyata partisipasi perempuan tergolong pada tipe spektator dan menuju ke tipe gladiator. Menarik untuk mencermati pendapat Kendrigen, untuk dapat ke tipe gladiator, ada dua cara yang ditempuh secara internal yaitu : *Pertama*, secara psikologis, para perempuan yang ingin terjun ke dunia politik praktis harus melawan kadar subjektifitasnya seperti mengurangi kadar emosi, berpikir rasional, dan jangan mengandalkan *feeling*, hilangkan egoisme. *Kedua*, secara politik perempuan harus lebih sering tampil di depan publik sehingga sosialisasi politik perempuan berada dalam perspektif yang lebih luas ketimbang seputar kasur dan dapur.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Beranjak dari temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perilaku pemberian suara perempuan dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang telah berubah seiring dengan perubahan format politik yaitu dari perilaku memilih yang bersifat tradisional-mobilisasi menjadi rasional-otonom. Rasionalisasi tersebut tercermin dalam tiga alasan yang dikemukakannya dalam memilih partai yaitu : (1) partai yang dipilih adalah partai yang disegani dan merasa terikat padanya ; (2) partai yang dipilih adalah partai yang reformis ; dan (3) partai yang dipilih sesuai dengan aspirasinya. Namun sayangnya pergeseran sifat perilaku memilih ini tidak diikuti oleh adanya *gender awareness* dari perempuan itu sendiri.
2. Akses perempuan dalam pemilu secara umum rendah terutama dalam hal-hal berikut : (a) menjadi panitia pelaksana pemungutan suara ; (b) terlibat dalam proses penghitungan suara ; (c) menjadi saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara ; (d) menjadi juru kampanye ; (e) menjadi panitia pelaksana kampanye ; (f) menjadi tim sukses kandidat ; (g) memperjuangkan isu-isu pemberdayaan perempuan ; (h) terdaftar sebagai anggota partai ; (i) menjadi pengurus partai ; (j) menjadi relawan partai ; dan (k) mengikuti proses rekrutmen caleg oleh partai. Hanya dalam dua jenis akses yang dapat digolongkan tinggi yaitu ikut memilih dalam pemilu dan menjadi simpatisan/penggembira dalam kampanye.
3. Rendahnya akses perempuan dalam pemilu paralel dengan lemahnya kontrol yang mereka berikan. Kontrol yang dapat mereka lakukan hanya dalam memberikan pertimbangan untuk memilih kandidat baik untuk caleg mau pun

anggota DPD. Sementara itu dalam hal kontrol lainnya masih tergolong lemah. Dalam konteks ini tercakup kontrol terhadap hal-hal berikut : sebagai saksi dan pemantau dalam pemilu, mempelajari program partai politik yang mmeberdayakan perempuan, menentukan kesalahan-kesalahan pada penyelenggaraan pemilu di TPS setempat, dan kontrol terhadap peluang terjadinya *money politic*.

B. Saran

1. Diharapkan adanya usaha yang simultan dari semua pihak untuk dapat memberdayakan perempuan di bidang politik. Sinergisitas ini hendaknya dikoordinir oleh Biro Pemberdayaan Perempuan yang ada di Provinsi.
2. Bagi perempuan sendiri diharapkan adanya upaya memberdayakan diri melalui beberapa sarana pendidikan agar dapat memiliki akses dan kontrol yang baik dalam kehidupan politik umumnya dan aktifitas politik khususnya seperti even pemilu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Irawan. (1997). *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Agustono, Budi dan Sri Emiyanti. (1998). *Peran Perempuan dalam Orsospol di Kotamadya Medan, 1992-1997*. Laporan Penelitian USU Medan.
- Alfian dan Melly G. Tan (Penyunting). (1988). *Kerangka Pembangunan dan Lepas Landas*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Almond, Gabriel A. & Sidney Verba. (1974) *Comparative Politic Today*. Boston : Little Brown and Co.
- Budiardjo, Miriam. (1981). *Partisipasi dan Partai Politik : Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : Gramedia.
- Cook, Elizabeth Adell, "Feminist Consciousness and Candidate Preference Among American Women 1972-1988" dalam *Political Behavior Vo.15, 1993*.
- Czudnowski, Moshe M. (1976). *Comparing Political Behavior*. London : Sage Publication Inc.
- Eko, Sutoro. (2004). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : APMD Press
- Gaffar, Afan. (1991). "Partisipasi Politik di Indonesia" dalam *Prospektif Nol.1 Vol.3*. Yogyakarta : FISIPOL-UGM.
- , (1992). *Javanese Voters : A Case Study of Election Under A Hegemonic Party System*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- , (1992). *Menjelaskan Voting Behavior di Indonesia : Kasus Yogyakarta*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional IX AIPI, Surabaya, 6-8 Agustus 1992.
- , (1997). *Sebuah Catatan untuk Wanita Indonesia*. Makalah disampaikan pada Seminar dalam rangka Dies Natalis UGM, Yogyakarta, 12 Desember 1997.
- Huntington, Samuel P. Dan Joan M Nelson. (1976). *No Easy Choise : Political Participation in Developing Countries*. Massachusetts : Harvard University Press.
- Mas'ood, Mohtar dan Colin MacAndrews (ed.). (1989). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : UI Press.

- 
- Mosse, Julia Cleves. (1996). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Noor, Irwan. (1994). "Partisipasi Politik Kaum Wanita (Studi di Tiga Dati II Jawa Timur)" dalam *Jurnal Universitas Brawijaya Vol.6 No.1* , April 1994.
- Patton M.Q. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbury Park : Sage Publication.
- Rosenthal, Cindy Simon, "The Role of Gender in Descriptive Representation" dalam *Political Research Quarterly, Vol.48 No.1, 1995*.
- Salviana, Vina. (1995). *Perempuan dalam Kehidupan Politik*. Malang : Pusat Studi Perempuan dan Kemasyarakatan Universitas Brawijaya.
- Sastroatmodjo, Sudjono. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang : IKIP Semarang Press.
- Siagian, Faisal, "Keterwakilan Perempuan Indonesia di Lembaga Legislatif" dalam *Jurnal Analisis CSIS Tahun XXV No.3, Mei-Juni 1996*.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Editor). (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Sjamsuddin, Nazaruddin (1988). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta : PT. Karunika.
- Stepan, Alfred (1978). *The State and Society Peru in Comparative Perspective*. Princeton University Press.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grassindo.
- Uhlen, Anders. (1997). *Oposisi Berserak : Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Terjemahan Rofik Suhud. Bandung : Mizan.
- Vredenberg J. (1979). *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.